

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Literatur

Bab kajian pustaka berisi tinjauan mengenai hasil-hasil penelitian sebelumnya serta teori-teori yang relevan dengan fokus penelitian yang sedang dilakukan :

Tabel 2.1 Tinjauan Literatur

No	Judul	Penulis	Persamaan	Perbedaan
1.	Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Menghadapi Peraturan EU Directive Tentang Sawit di Eropa Tahun 2017-2019	Dini Tiara Sasmi	Permasalahan yang dimunculkan tidak jauh berbeda mengenai bagaimana Upaya yang dilakukan Pemerintah Indonesia dalam menghadapi serangan dari Uni Eropa	<ol style="list-style-type: none">1. teori yang memakai perspektif strukturalisme dan konsep peranan juga menggunakan teori perdagangan internasional ditambah pada kajian ini lebih menekankan pada upaya internal yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia menghadapi RED II tersebut seperti adanya pemulihan tata kelola dan sektor hilirasasi dan memaksimalkan pemakaian minyak sawit di dalam negeri. Sementara penelitian ini akan menggunakan teori multitrack dilomasi2. Periode yang di ambil berbeda jurnal ini membahas pada periode 2017 – 2019

				sedangkan penelitian ini membahas dari periode 2018 – 2021
2.	Analisis Strategi Perlawanan Indonesia Dalam Diskriminasi Kelapa Sawit oleh Uni Eropa	M. Fuadillah Nugraha	Pembahasan yang dibahas sama –sama mengenai strategi yang dilancarkan oleh Indonesia terhadap tindakan diskriminasi yang dilakukan UNi Eropa kepada minyak kelapa sawit.	permasalahan yang dimunculkannya tulisan Fuadillah lebih menitik fokuskan pada usaha pemerintah Indonesia dalam menentang regulasi yang dikeluarkan oleh Uni Eropa dalam mempromosikan kepentingan nasional dan kepentingan ekonominya dengan menggunakan perspektif liberalisme dan idealisme dengan asumsi dasar perdamaian dan meminimalisir perang.
3.	Upaya Presiden Joko Widodo Dalam Menghadapi Penolakan Ekspor Komoditas CPO (Crude Palm Oil) oleh Uni Eropa Tahun 2017-2020	Vioneida Pranggadia Lestari Alen, Alfian Hidayat, Khairur Rizki	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membahas mengenai minyak kelapa sawit yang menjadi masalah dalam ranah perdagangan internasional antara Indonesia dan Uni Eropa 2. Penelitian ini juga membahas kebijakan industrialisasi dan pembukaan pasar baru untuk menjadi jalan keluar dari permasalahan yang dibahas mengenai Uni Eropa dengan 	<ol style="list-style-type: none"> 3. Jurnal ini lebih menitik beratkan pada peranan seorang kepala negara Indonesia yaitu bapak Joko Widodo dalam menangani permasalahan minyak kelapa sawit dengan Uni Eropa. 4. Jurnal ini menggunakan pendekatan merkantilisme dengan menekankan neran negara dengan dukungan teori pilihan rasional <i>rational choice</i>.

			Indonesia mengenai minyak kelapa sawit.	
4.	Post Truth Dalam Perseteruan Indonesia-Uni Eropa mengenai Isu Kelapa Sawit	Aditya Dwindia Pratama	Variabel yang dimunculkan sama yaitu Indoensia, Uni Eropa dan permasalahan kelapa sawit	<p>1. Pembahasan yang dipaparkan mengenai kebenaran pada setiap alasan yang dikeluarkan baik dari pihak Uni eropa yang melakukan pelarangan minyak kelapa sawit karena melanggar SDGs sebab untuk membuka lahan perkebunan kelapa sawit harus mendeforestasikan hutan yang mengakibatkan terancamnya satwa yang aa di hutan tersebut dan Indonesia yang dengan sangat tegas bahwa hal tersebut dilakukan untuk mengatasi kemiskinan karena komoditas minyak kelapa sawit adalah salah satu komoditas yang tinggi dalam menyumbang pendapatan negara.</p> <p>2. Kajian ini menggunakan <i>post truth theory</i> dan <i>trade off theory</i></p>
5.	Analisis perubahan sikap Uni Eropa Terhadap Impor Minyak Kelapa Sawit Indonesia	Muhammad Aditya Pradhana	Membahasn mengenai permasalahan Indonesia dengan Uni Eropa dengan isu pelarangan minyak kelapa sawit yang	<p>1. Kajian ini menggunakan teori <i>new institutionalism</i> yang terfokus pada perubahan tindakan yang diambil oleh Uni Erpa terkait</p>

			dilakukan oleh Uni Eropa	waktu tenggat pelarangan impor minyak kelapa sawit ke Uni Eropa sebagai bentuk ari kepentingan yang harus di dahulukan mengingat target yang di tuju oleh Uni eropa tidak akan maksimal jika langsung melepas minyak kepala sawit impor disamping itu negara anggota Uni Eropa yang memproduksi minyak nabati belum mampu untuk menutupi gap yang kosong untuk pencapaian meningkatkan konsumsi energy terbarukan sebesar 32% di tahun 2030.
6.	Dampak Kebijakan Proteksionisme Kelapa Sawit Uni Eropa Terhadap Ekspor Kelapa Sawit Indonesia ke Uni Eropa	Rd. Dzaky Nur Rachman	membahas mengenai minyak kelapa sawit Indonesia yang dibatasi oleh Uni Eropa dengan mengeluarkan RED II	1. Pembahasan yang dibahas seputar kebijakan proteksionisme sebagai cara yang dilakukan Uni eropa sedangkan pada penelitian ini lebih menitikfokuskan pada strategi yang digunakan Indonesia untuk merespon tindakan yang dilakukan Uni Eropa dengan menggunakan teori multitrack diplomasi .

Literatur pertama yaitu jurnal dengan berjudul Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Menghadapi Peraturan EU Directive tentang Sawit di Eropa Tahun 2017-2019 yang ditulis oleh Dini Tiara Sasmi yang dipublikasi melalui *Frequency of International Relations*, Vol 1 (2) , Januari 2019. Pada jurnal ini Dini membahas terkait upaya pemerintah Indonesia dalam menghadapi regulasi yang di keluarkan oleh Uni Eropa yaitu RED II (Renewable Energy Directives II) yang isinya lebih condong mendiskriminasikan Minyak sawit karena dianggap tidak ramah lingkungan.

Kajian ini menggunakan konsep peranan dan perspektif strukturalisme untuk menjelaskan *case* yang diteliti, juga menggunakan teori untuk perdagangan internasional sebagai pendukung dalam kajian tersebut. Berdasarkan hasil temuan di atas penelitian Dini Tiara Sasmi mempunyai persamaan dengan penelitian ini yaitu membahas upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk menghadapi regulasi RED II yang dikeluarkan oleh Uni eropa, namun ada perbedaan yang signifikan antara penelitian ini dengan jurnal yang ditulis oleh Dini yaitu konsep dan teori yang pakai berbeda ditambah pada kajian Dini lebih menekankan pada uapaya internal yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia menghadapi RED II tersebut seperti adanya pemulihan tata kelola dan sektor hilirasasi dan memaksimalkan pemakaian minyak sawit di dalam negeri (Sasmi, 2019).

Literatur yang kedua jurnal yang ditulis oleh M. Fuadillah Nugraha dengan judul “Analisis Strategi Perlawanan Indonesia Dalam Diskriminasi Kelapa Sawit oleh Uni Eropa” yang dikeluarkan oleh *Jurnal Al-Adalah*, vol 6 no. 1, Januari 2021.

Hasil temuan yang didapat pada jurnal ini yaitu faktor- faktor yang menjadi penyebab Uni Eropa mengeluarkan RED II karena berdasarkan penelitian Fuadillah minyak sawit menjadi penyumbang terbesar dalam deforestation hutan yang sama saja tidak sejalan dengan SDGs yang dikeluarkan oleh PBB karena tindakan tersebut sama saja dengan merusak lingkungan dan mulai munculnya *black campaign* yang membuat asumsi bahwa minyak kelapa sawit tidak baik bagi kesehatan dan lingkungan.

Dalam tulisan fuadillah juga, yaitu dengan mengajukan klaim dan gugatan kepada Uni Eropa dengan menolak pembatasan impor minyak kelapa sawit, lalu melakukan lobi terhadap organisasi APEC (Asia Pacific Economic Cooperation) sebagai tindakan keamanan untuk komoditas kelapa sawit Indonesia, dan melaksanakan *Join Campaign* atau kampanye bersama kepada seluruh produsen minyak kelapa sawit di Dunia untuk menjaga stabilitas minyak kelapa sawit di pasar internasional dan sebagai bentuk perlawanan dari *black Campaign* bagi sektor industry minyak kelapa sawit (Nugraha, 2021).

Perbedaan kajian yang dilakukan Fuadillah dengan penelitian ini tampak pada permasalahan yang dimunculkan tulisan Fuadillah lebih menitik fokuskan pada usaha pemerintah Indonesia dalam menentang regulasi yang dikeluarkan oleh Uni Eropa dalam upaya untuk mendorong kepentingan nasional serta kepentingan ekonomi, pendekatan yang dapat diambil adalah melalui perspektif liberalisme dan idealisme. Kedua perspektif ini berlandaskan pada asumsi fundamental mengenai pentingnya perdamaian dan pengurangan potensi konflik bersenjata. Dengan demikian, strategi yang diterapkan akan menekankan pada kerja sama internasional dan diplomasi sebagai cara untuk mencapai tujuan nasional, sekaligus menciptakan

stabilitas yang diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. (Nugraha, 2021).

Literatur ketiga, yang berjudul “Upaya Presiden Joko Widodo Dalam Menghadapi Penolakan Ekspor Komoditas CPO (Crude Palm Oil) oleh Uni Eropa Tahun 2017-2020” yang ditulis oleh Vioneida Pranggadia Lestari Alen, Alfian Hidayat, Khairur Rizki. Yang dikeluarkan oleh JGD : Indonesian Journal of Global Discourse, Vol. 3 Ed.1, Januari – Juni 2021.

Jurnal ini lebih menitik fokuskan pembahasannya terhadap berbagai tindakan yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo sebagai kepala negara dalam menghadapi permasalahan minyak kelapa sawit dengan Uni eropa. Dengan mengeluarkan kebijakan industrialisasi dan pembukaan pasar baru baik nasional maupun internasional. kebijakan ini dikeluarkan dengan alasan melihat meningkatnya konsumsi dan invitasi terdapat minyak kelapa sawit global dan nasional terkhusus pada periode 2017 – 2020 dengan teori merkantilisme dan teori *rational choice* yang digunakan pada jurnal tersebut. Upaya lain yang dilakukan presiden Jokowi dalam menghadapi *ban crude palm oil* Uni Eropa dengan mengeluarkan kebijakan retifikasi ISPO yang digunakan untk melawan tuduhan Uni Eropa terhadap minyak kelapa sawit Indonesia (Pranggadia L.A, 2021).

Literatur keempat yang ditulis oleh Aditya Dwindia Pratama dengan judul “Post Truth Dalam Perseteruan Indonesia-Uni Eropa mengenai Isu Kelapa Sawit”, yang di keluarkan oleh Politica Vol. 10 No. 2 November 2019. Dalam jurnal ini membahas mengenai kebenaran pada setiap alasan yang dikeluarkan baik dari pihak Uni eropa yang melakukan pelarangan minyak kelapa sawit karena melanggar SDGs sebab untuk membuka lahan perkebunan kelapa sawit harus

mendeforestasikan hutan yang mengakibatkan terancamnya satwa yang ada di hutan tersebut dan Indonesia yang dengan sangat tegas bahwa hal tersebut dilakukan untuk mengatasi kemiskinan karena komoditas minyak kelapa sawit adalah salah satu komoditas yang tinggi dalam menyumbang pendapatan negara.

Dengan menggunakan *post truth theory* dan *trade off theory* kedua negara tersebut sebenarnya sedang memperjuangkan kepentingan masing –masing. Dalam jurnal ini lebih menekankan pada tujuan dibalik argumen- argumen yang di keluarkan dari dua belah pihak untuk kepentingan nasionalnya. Namun di jurnal ini tidak menjelaskan secara spesifik apa yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak agar tidak saling serang dan mendapat jalan keluar dengan damai (Pratama, 2019).

Literatur kelima yaitu jurnal yang berjudul “ Analisis Perubahan Sikap Uni Eropa Terhadap Impor Minyak Kelapa Sawit Indonesia” yang ditulis oleh Muhammad Aditya Pradhana yang dikeluarkan oleh Journal of International Relations, Vol. 6, No. 4, 2020. Pada jurnal ini pembahasan yang dipaparkan lebih fokus mengenai perubahan sikap yang diambil oleh Uni Eropa terhadap minyak kelapa sawit yang bermula akan melakukan tindakan pelarangan impor kelapa sawit pada tahun 2021 mengalami kemunduran tenggat waktu hingga 2030.

Sedangkan melihat tindakan yang dilancarkan oleh beberapa negara anggota Uni Eropa seperti Prancis, Belanda, Swedia, Belgia, Jerman, Italia, Spanyol, Brussels dan Portugal terus melakukan aksi kampanye untuk mendesak komisi memulai keluar dari minyak kelapa sawit dalam undang- undang yang telah didelegasikan pada 1 Februari 2019 (Pradhana, 2020).

Aksi kampanye ini untuk meyakinkan bahwa dengan tidak lagi memakai minyak kelapa sawit akan membantu meminimalisir kepunahan banyak jenis hewan

seperti orang-utan yang di sebabkan oleh deforestasi hutan. salah satu alasan Uni Eropa memundurkan tenggat waktu pelarangan menjadi di tahun 2030 karena jika negara anggota yang memproduksi minyak nabati belum mampu untuk mengisi gap kosong jika pelarangan minyak kelapa sawit mulai diberlakukan. Sesuai dengan teori yang dipakai pada jurnal ini yaitu teori new institusionalisme terdapat kepentingan regional dengan tujuan yang lebih besar (Pradhana, 2020).

Literatur yang ke enam yaitu sebuah tulisan penelitian skripsi yang di tulis oleh Rd. Dzaky Nur Rachman dengan judul “ Dampak Kebijakan Proteksionisme Kelapa Sawit Uni Eropa Terhadap Ekspor Kelapa Sawit Indonesia Ke Uni Eropa” yang telah di lulus pada tahun 2022 dalam karya ilmiah ini lebih menitikberatkan pada bagaimana usaha Uni Eropa yang melakukan proteksionisme dengan mengeluarkan RED I dan II sebagai standar untuk menahan laju Impor minyak kelapa sawit dari Indonesia dengan menggunakan teori proteksionisme, perdagangan internasional, teori ekspor, teori impor, merkantilisme, dan ekonomi hijau dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif.

Berdasarkan pemaparan dari ke enam jurnal di atas dengan menggunakan 1 teori yang berbeda terhadap suatu pembahasan materi yaitu permasalahan sengketa minyak kelapa sawit beserta kekurangan dan kelebihan yang dimiliki oleh masing-masing teori tersebut dan ada beberapa yang sudah diaplikasikan ke dalam sebuah aturan atau kebijakan luar negeri dalam ekspor minyak kelapa sawit itu sendiri.

Ternyata masih membuat Uni Eropa mengeluarkan kebijakan RED II yang isinya membahas mengenai minyak kelapa sawit yang tidak memenuhi standar yang harus dipenuhi dengan alasan produksi minyak kelapa sawit merusak lingkungan dan tidak sejalan dengan program pembangunan berkelanjutan atau

lebih sering disebut SDGs yang dibuat oleh PBB sehingga Uni Eropa mengambil tindakan untuk mengurangi impor minyak kelapa sawit dari Indonesia.

Sehingga penelitian ini dibuat dengan menggunakan teori *multi track* diplomasi dimana bisa diharapkan, dengan sudut pandang teori *multi track* diplomasi ini, setidaknya ekspor minyak kelapa sawit Indonesia bisa tetap menjadi komoditas terbesar tanpa harus memasok ke Uni Eropa yang saat ini masih memegang posisi sebagai importer minyak kelapa sawit Indonesia kedua terbesar setelah India.

Meski hal tersebut mungkin menjadi kekhawatiran tersendiri bagi Uni Eropa karena tidak ada kata takut dari Indonesia yang terus membuktikan bahwa Indonesia bisa menjadi komoditas minyak nabati terbesar tanpa harus ekspor ke Uni Eropa, dan menjadi pesaing pagi minyak nabati yang dimiliki oleh Uni Eropa yang juga memproduksi minyak nabati dengan jenis yang berbeda, namun itu akan menjadi pembahasan lain karena mengarah pada ranah ekonomi internasional, sedangkan penelitian ini bertujuan agar ekspor minyak kelapa sawit dari Indonesia kembali normal.

2.2 Kerangka Teoritis/Konseptual

2.2.1 Kebijakan Luar Negeri

Kebijakan luar negeri merupakan komponen penting dari kebijakan yang akan diselenggarakan oleh negara yang berdaulat. Dalam ruang lingkup internasional kebijakan luar negeri sangat dibutuhkan pada suatu negara untuk dapat ikut berkontribusi memenuhi apa yang menjadi kebutuhan negara. Mark R. Amstutz (1995) menjabarkan kebijakan luar negeri sebagai aksi yang dilakukan pemerintah baik secara terbuka maupun tertutup yang dirancang untuk menaikan kepentingan

nasional di runag lingkup Internasional. Jemandu (2014) menekankan bahwa kebijakan luar negeri pada suatu negara harus lebih focus pada nilai-nilai yang menjadi tujuan dasar sebuah negara dan juga perangkat yang akan digunakan untuk mencapai tujuan tersebut.

Para pembuat kebijakan harus dapat memaksimalkan kesempatan yang ada juga meminimalisir kendala-kendala yang akan dihadapi. Kapabilitas sebuah negara dalam merumuskan kebijakan luar negerinya dapat dibedakan menjadi dua cara, pertama dengan *soft power* meliputi nilai-nilai kebudayaan dan diplomasi dan yang kedua *hard power* dengan menggunakan militer dan teknologi.

2.2.2 Multi Track Diplomasi

Berdasarkan ke lima literatur yang telah ditemukan dengan kerangka teoritis dan konseptual yang berbeda mengenai permasalahan yang dihadapi Indonesia dengan Uni Eropa terkait minyak kelapa sawit. dengan demikian penelitian ini akan memfokuskan pembahasan mengenai peneraparan teori nutri track diplomasi terhadap permasalahan kelapa sawit Indonesia yang didiskriminasi oleh Uni Eropa berdasarkan regulasi RED II. Teori *multi track diplomacy* merupakan salah satu teori atau kerangka konseptual yang di rancang untuk dapat melakukan aktivitas dengan tujuan menciptakan perdamaian.

Teori *multi track diplomacy* muncul sebagai hasil dari perluasan track pertama yaitu government yang dinilai masih kurang efektif dalam penyelesaian perdamaian sehingga dibutuhkan actor lain selain *state* (Mujiono & Alexandra, 2019). Berdasarkan perkembangan track tersebut maka konsep *Multi Track Diplomacy* memiliki Sembilan track atau jalur diplomasi dengan perbedaan karakteristik aktor pada masing – masing track yaitu :

1. Track satu Diplomasi yaitu *government*, peran pemerintah penting untuk meyakinkan bahwa kepentingan nasional suatu negara dapat terpenuhi melalui jalur diplomasi dan negosiasi dengan eksekutif, legislatif, dan yudikatif sebagai tiga aktor kluster pada track satu ini.
2. Track dua diplomasi memiliki *Non-government/ professional or peace making through conflict resolution* salah satu contohnya adalah organisasi internasional sebagai aktor yang memiliki tujuan sama seperti track satu yaitu mewujudkan perdamaian melalui jalur diplomasi dan negosiasi dengan strategi khusus ketika sedang melancarkan aksinya melalui komunikasi sehingga menumbuhkan rasa saling memahami dan mendapatkan solusi dari persoalan secara bersama-sama. *Track* dua ini di lahir dari pemikiran Josep Montiville pada tahun 1982 pada Institute Pelayanan Luar Negeri (*foreign Service Institute*) untuk menerangkan atau mendeskripsikan metode negosiasi dalam diplomasi yang dilakukan oleh aktor non negara (Dr. Louise Diamond, n.d.).
3. Track tiga memiliki *Business or Peace-making through commerce*. Keterlibatan kelompok bisnis sebagai aktor juga merupakan salah satu cara untuk mewujudkan perdamaian yang lebih mengarah pada pembangunan ekonomi masyarakat secara internasional dengan cara membangun relasi dan jaringan – jaringan antar negara.

4. Track empat diplomasi memiliki *Private Citizen, or peace-making through personal Involvement* sebagai aktor penting dalam hubungan internasional yang ikut andil dalam menyelesaikan permasalahan yang tengah dihadapi dengan cara membangun hubungan antar individu dengan latar belakang yang berbeda sehingga dapat mempengaruhi suatu kebijakan publik dalam upaya menciptakan perdamaian internasional saat muncul berbagai isu yang dapat mengancam perdamaian internasional.
5. Track lima diplomasi memiliki *Research, Training, and Education or Peace-making through Learning* menjadi aktor dalam track lima diplomasi ini karena melalui pendidikan para akademisi akan menjadi sosok yang lebih kritis untuk menghadapi suatu persoalan internasional karena sudah terlatih sehingga tidak akan langsung mengambil tindakan tanpa memikirkan resiko yang akan diterima. Disamping itu juga lembaga pendidikan memiliki jalur langsung ke pemerintah sehingga kontribusi yang besar dari lembaga pendidikan sangat mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh pemerintah dalam menghadapi permasalahan internasional.
6. Track enam diplomasi memiliki *Activism or peace-making through Advocacy* sebagai aktor yang lebih menitik beratkan pada aktivis dengan cara menggunakan advokasi untuk mewujudkan perdamaian internasional

7. Track tujuh diplomasi memiliki *Religious or Peace-making through Faith in Action* sebagai aktor untuk menciptakan perdamaian karena hampir di setiap kelompok baik dalam skala kecil hingga sebuah negara memiliki keyakinan yang diyakini dan menjadikan itu sebagai peraturan untuk mengatur kehidupan manusia. Melihat hari banyaknya fenomena yang berkaitan dengan agama dapat dicermati bahwa pengaruh yang dimiliki kelompok religious ini sangat besar dan dapat meredam berbagai isu tertentu baik di tingkat nasional maupun internasional.
8. Track delapan diplomasi memiliki *Funding or peace-making through Providing Resources* sebagai aktor yang lebih fokus sebagai penyedia dana atau bantuan untuk segala jenis gerakan perdamaian dengan demikian track delapan ini dapat berkontribusi aktif dalam mewujudkan perdamaian dengan cara sponsorship kepada track-track yang ada dalam diplomasi multi track kecuali track satu yaitu government karena setiap negara pasti mempunyai anggaran untuk melakukan suatu bentuk aktivitas dalam bernegosiasi dan diplomasi.
9. Track Sembilan diplomasi memiliki *Communications and the Media or peace-making through Informatin* sebagai aktor ini menjadi salah satu aktor yang penting karena peran media yang sangat berpengaruh bagi berbagai golongan masyarakat dan menjadi penentu dalam penciptakan opini publik dan menyampaikan informasi terhadap suatu permasalahan yang akan

di terima. Melalui media para aktor dari berbagai track dapat berkomunikasi sehingga dapat membangun suatu toleransi dan pemahaman pada setiap aktor internasional.

Dari kesembilan track di atas penelitian ini akan memakai 4 track yang dianggap dapat menjadi strategi Indonesia dalam merespon hambatan perdagangan minyak kelapa sawit dengan Uni Eropa, keempat track tersebut adalah sebagai berikut :

Track Satu Diplomasi : Government

Seperti yang sudah dipaparkan di atas pemerintah mempunyai peran yang sangat penting untuk meyakinkan bahwa kepentingan nasional suatu negara dapat terpenuhi melalui jalur diplomasi dan negosiasi dengan eksekutif, legislatif, dan yudikatif sebagai tiga aktor kluster pada track satu ini. Track satu ini dapat diterapkan oleh pemerintah Indonesia dengan membuat kebijakan industrialisasi dan pembukaan pasar baru.

Track Dua Diplomasi : Non-government/ professional or peace making through conflict resolution

Track dua ini dapat diterapkan untuk menjadi salah satu cara Indonesia dalam meng-counter hambatan perdagangan minyak kelapa sawit dengan Uni Eropa karena Indonesia dan Uni Eropa merupakan sama – sama anggota *World Trade Organization* (WTO) yaitu satu – satunya organisasi internasional yang mengatur perdagangan dunia selain itu juga salah satu wewenang yang dimiliki WTO yaitu menangani suatu permasalahan perdagangan seperti yang sedang dialami oleh Indonesia dan Uni Eropa terkait minyak kelapa sawit.

Track Tiga Diplomasi : *Business or Peace-making through commerce*

Track tiga dapat diterapkan dalam masalah penelitian ini karena perdagangan minyak kelapa sawit tidak seratus persen dikelola oleh pemerintah tetapi ada juga yang di kelola oleh swasta dengan menggunakan power yang dimiliki oleh instansi swasta pada sektor minyak kelapa sawit dapat mempermudah lobi agar pembukaan pasar baru bisa berjalan dengan lancar karena relasi yang dimiliki jauh lebih luas.

Track Sembilan Diplomasi : *Communications and the Media or peace-making through Information*

Dengan menggunakan Track Sembilan ini Indonesia dapat ikut berkontribusi dalam Join Campaign yang dilakukan oleh para produsen minyak kelapa sawit dalam melawat Black Campaign yang dilakukan oleh Uni Eropa melalui media agar citra minyak kelapa sawit kembali baik. Media sangat berperan penting untuk menyebarkan suatu informasi dan dengan menggunakan media dapat membantu proses yang dilakukan oleh track satu, dua, dan tiga.

Untuk track empat, lima, enam, tujuh, dan delapan ini tidak dijelaskan lebih lanjut karena untuk track tersebut tidak sesuai dengan pembahasan penelitian ini karena track empat *Private Citizen, or peace-making through personal Involvement* kurang optimal untuk dapat menyelesaikan permasalahan ini karena pada ruang lingkup dari permasalahan ini sudah ditangani oleh organisasi internasional dan juga kelompok komoditas bisnis minyak kelapa sawit.

Untuk track lima *Research, Training, and Education or Peace-making through Learning* focus penelitian ini mengenai bagaimana hambatan perdagangan minyak kelapa sawit Indonesia dengan Uni Eropa sehingga tidak ada korelasinya dengan pendidikan jika dimasukkan akan terjadinkerancuan dalam kajian penelitian sebab

perbedaan yang signifikan antara pendidikan yang menjadi salah satu track diplomasi ini dengan permasalahan yang diangkat.

Track enam *Activism or peace-making through Advocacy* juga kurang cocok untuk menjadi salah satu track yang akan digunakan pada penelitian ini karena sejauh ini tidak ada dijumpai aktivis yang mengangkat topic terkait masalah perdagangan di tingkat internasional. Track tujuh *Religious or Peace-making through Faith in Action* kurang optimal dalam penyelesaian hambatan perdagangan minyak kelapa sawit Indonesia Uni Eropa.

Track delapan *Funding or peace-making through Providing Resources* juga kurang cocok digunakan pada penelitian ini karena pemerintah Indonesia seharusnya mempunyai anggaran untuk menyelesaikan permasalahan ini tanpa harus meminta dana bantuan dari pihak lain karena setiap negara pasti memiliki anggaran setiap melakukan tindakan yang memerlukan anggaran.

2.2 Asumsi Penelitian

Menindaklanjuti penjelasan mengenai penerapan multi Track diplomasi terkait permasalahan minyak kelapa sawit Indonesia dengan Uni Eropa yang terkendala akibat dari regulasi RED yang dikeluarkan oleh Uni Eropa. Sehingga teori mutri track diplomasi yang dapat diimplementasikan terhadap permasalahan yang dikaji. Track satu karena pemerintah Indonesia dan Uni Eropa sebagai aktor dapat membicarakan permasalahan ini melalui pertemuan untuk menemukan solusi agar tidak saling merugikan, lalu track dua harus ada yang menengahi permasalahan tersebut WTO selaku organisasi internasional untuk menengahi permasalahan minyak kelapa sawit ini. Track dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan adanya

kelompok bisnis pada sektor kelapa sawit akan mempermudah proses pembukaan pasar baru yang akan di aplikasikan oleh pemerintah Indonesia, dan track Sembilan dapat membantu semua proses yang di lakukan oleh track satu, dua ,tiga melalui penyebaran informasi diberbagai platform media yang tersedia.

2.3 Kerangka Analisis

